



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 33 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, menyebutkan bahwa Gaji dan Tunjangan yang diterima PPPK dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan dan tidak ditanggung oleh Pemerintah;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka kelas jabatan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

- 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 60);
20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 71);
21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);
22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 27 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 27

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas TPP ASN dibebankan pada APBD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (1a) TPP ASN yang diterima oleh PPPK dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan dan tidak ditanggung oleh Daerah.
  - (2) Setiap SKPD harus melakukan input penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) pada sistem Aplikasi *My TPP* baik pada saat awal maupun pada saat terjadi perubahan penghasilan yang disebabkan diantaranya seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi jabatan, serta perubahan status perkawinan dan jumlah anggota keluarga.
  - (3) Kelalaian atau kekeliruan pada input penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.
2. Lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 13 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 72

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
 NOMOR : 72 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 13 JULI 2023

1. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI II)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Inspektur	Inspektorat	14	Rp 12.305.413	100%	72,5%		Rp 21.226.838
2	Sekretaris	Inspektorat	12	Rp 8.830.976	100%	57,5%		Rp 13.908.787
3	Inspektur Pembantu I	Inspektorat	11	Rp 6.827.448	100%	57,5%		Rp 10.753.231
4	Inspektur Pembantu II	Inspektorat	11	Rp 6.827.448	100%	57,5%		Rp 10.753.231
5	Inspektur Pembantu III	Inspektorat	11	Rp 6.827.448	100%	57,5%		Rp 10.753.231
6	Inspektur Pembantu IV	Inspektorat	11	Rp 6.827.448	100%	57,5%		Rp 10.753.231
7	Inspektur Pembantu V	Inspektorat	11	Rp 6.827.448	100%	57,5%		Rp 10.753.231
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sub Bagian Perencanaan	9	Rp 5.166.121	100%	47,5%		Rp 7.620.028
9	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	9	Rp 5.166.121	100%	47,5%		Rp 7.620.028
10	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum	Sub Bagian Administrasi dan Umum	9	Rp 5.166.121	100%	47,5%		Rp 7.620.028
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
11	Auditor Madya	Inspektorat	12	Rp 8.830.976	100%	40%	35%	Rp 15.454.208
12	Auditor Muda	Inspektorat	10	Rp 5.938.831	100%	40%	35%	Rp 10.392.955
13	Auditor Pertama	Inspektorat	8	Rp 4.152.215	100%	40%	35%	Rp 7.266.375
14	Auditor Penyelia	Inspektorat	9	Rp 5.166.121	100%	40%	35%	Rp 9.040.712
15	Auditor Pelaksana Lanjutan	Inspektorat	7	Rp 3.660.991	100%	40%	35%	Rp 6.406.735
16	Auditor Pelaksana	Inspektorat	6	Rp 3.181.359	100%	40%	35%	Rp 5.567.378
17	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Madya	Inspektorat	12	Rp 8.830.976	100%	40%	35%	Rp 15.454.208
18	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda	Inspektorat	10	Rp 5.938.831	100%	40%	35%	Rp 10.392.955
19	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama	Inspektorat	8	Rp 4.152.215	100%	40%	35%	Rp 7.266.375
20	Pranata Komputer Muda	Inspektorat	9	Rp 5.166.121	100%	15%		Rp 5.166.121
21	Pranata Komputer Pertama	Inspektorat	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
22	Pranata Komputer Penyelia	Inspektorat	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
23	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Inspektorat	7	Rp 3.660.991	100%	15%		Rp 4.210.140
24	Pranata Komputer Pelaksana	Inspektorat	6	Rp 3.181.359	100%	15%		Rp 3.658.563
25	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Inspektorat	5	Rp 2.653.156	100%	15%		Rp 3.051.130
26	Penata Laksana Barang Penyelia	Inspektorat	9	Rp 5.166.121	100%	15%		Rp 5.941.039
27	Penata Laksana Barang Mahir	Inspektorat	8	Rp 4.152.215	100%	15%		Rp 4.775.047
28	Penata Laksana Barang Terampil	Inspektorat	7	Rp 3.660.991	100%	15%		Rp 4.210.140
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
29	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
31	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
32	Pengelola Bahan Perencanaan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
33	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
34	Analisis Data dan Informasi	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
35	Pengelola Data Rekonsiliasi	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
36	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
37	Pengelola Data Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
38	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
39	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	100%	37,5%		Rp 5.033.863
40	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	100%			Rp 3.660.991
41	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
42	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
43	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	100%			Rp 3.181.359
44	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
45	Pengadministrasi Kepegawaian	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
46	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	100%			Rp 2.653.156
47	Pengemudi	Sekretariat	3	Rp 1.299.257	100%	37,5%		Rp 1.786.479



2. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI III)

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	14	Rp 12.305.413	100%	55%		Rp 19.073.390
2	Sekretaris	Sekretariat	12	Rp 8.830.976	100%	45%		Rp 12.804.915
3	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Bidang Sumber Daya Air	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
4	Kepala Bidang Bina Marga	Bidang Bina Marga	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
5	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
6	Kepala Bidang Tata Ruang	Bidang Tata Ruang	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
7	Kepala Bidang Pertanahan	Bidang Pertanahan	11	Rp 6.827.448	100%	45%		Rp 9.899.800
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Sub Bagian Perencanaan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
9	Kepala Sub Bagian Keuangan	Sub Bagian Keuangan	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
10	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
11	Kepala UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
12	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	8	Rp 4.152.215	100%	35%		Rp 5.605.490
<b>JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TUPOKSI</b>								
13	Teknik Pengairan Muda	Bidang Sumber Daya Air	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
14	Teknik Jalan dan Jembatan Muda	Bidang Bina Marga	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
15	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	9	Rp 5.166.121	100%	35%		Rp 6.974.263
16	Penata Ruang Muda	Bidang Tata Ruang	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
17	Penata Ruang Muda	Bidang Pertanahan	10	Rp 5.938.831	100%	35%		Rp 8.017.422
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
18	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
20	Teknisi Pengairan Muda	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
21	Teknisi Pengairan Pertama	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
22	Teknisi Jalan dan Jembatan Muda	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
23	Teknisi Jalan dan Jembatan Pertama	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
24	Penata Ruang Muda	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	10	Rp 5.938.831	95%	10%		Rp 6.235.773
25	Penata Ruang Pertama	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
26	Pranata Komputer Muda	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
27	Pranata Komputer Pertama	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
28	Pranata Komputer Penyelia	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
29	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
30	Pranata Komputer Pelaksana	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	6	Rp 3.181.359	95%	10%		Rp 3.340.427
31	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	5	Rp 2.653.156	95%	10%		Rp 2.785.814
32	Penata Laksana Barang Penyelia	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9	Rp 5.166.121	95%	10%		Rp 5.424.427
33	Penata Laksana Barang Mahir	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8	Rp 4.152.215	95%	10%		Rp 4.359.825
34	Penata Laksana Barang Terampil	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	7	Rp 3.660.991	95%	10%		Rp 3.844.041
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
35	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
36	Pengelola Bahan Perencanaan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
37	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Bendahara	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%	25%		Rp 4.393.190
39	Verifikator Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
40	Pengelola Keuangan	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
41	Pengadministrasi Keuangan	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
42	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
43	Analisis Tata Laksana	Sekretariat	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
44	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
45	Pengelola Kepegawaian	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
46	Pengelola Teknologi Informasi	Sekretariat	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
47	Pengadministrasi Umum	Sekretariat	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
48	Pengemudi	Sekretariat	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109
49	Analisis Sumber Daya Air	Bidang Sumber Daya Air	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
50	Pengawas Pengairan	Bidang Sumber Daya Air	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
51	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Bidang Sumber Daya Air	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
52	Pengelola Pengairan	Bidang Sumber Daya Air	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
53	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Bidang Sumber Daya Air	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
54	Teknisi Air	Bidang Sumber Daya Air	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
55	Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air	Bidang Sumber Daya Air	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
56	Pengadministrasi Umum	Bidang Sumber Daya Air	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	Pengawas Jalan dan Jembatan	Bidang Bina Marga	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
58	Penyusun Rencana Pengawasan	Bidang Bina Marga	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
59	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Bidang Bina Marga	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
60	Pengelola Pemeliharaan Jalan	Bidang Bina Marga	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
61	Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan	Bidang Bina Marga	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
62	Pengadministrasi Umum	Bidang Bina Marga	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
63	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
64	Pemeriksa Sanitasi	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
65	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
66	Penelaah Mutu Konstruksi	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
67	Pengolah Data	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
68	Pengelola Jasa Konstruksi	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
69	Pengadministrasi Umum	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
70	Analisis Tata Ruang	Bidang Tata Ruang	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
71	Penyusun Rencana Tata Ruang	Bidang Tata Ruang	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
72	Pengawas Tata Ruang	Bidang Tata Ruang	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
73	Pengelola Tata Ruang	Bidang Tata Ruang	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
74	Pengadministrasi Umum	Bidang Tata Ruang	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
75	Pengemudi	Bidang Tata Ruang	3	Rp 1.299.257	95%	25%		Rp 1.559.109

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	Analisis Survei, Pengukuran dan Pemetaan	Bidang Pertanahan	7	Rp 3.660.991	95%			Rp 3.477.942
77	Pengelola Administrasi Pertanahan Desa atau Kelurahan	Bidang Pertanahan	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
78	Pengadministrasi Pertanahan	Bidang Pertanahan	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
79	Pengelola Laporan Data Penerimaan	UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
80	Pengelola Laboratorium	UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	6	Rp 3.181.359	95%			Rp 3.022.291
81	Operator Alat Berat	UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
82	Teknisi Laboratorium	UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499
83	Pengadministrasi Umum	UPTD Peralatan dan Pengujian Material Konstruksi	5	Rp 2.653.156	95%			Rp 2.520.499

**3. PAGU ANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT (KLASIFIKASI IV)**

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>JABATAN STRUKTURAL</b>								
1	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13	Rp 11.044.239	100%	45%		Rp 16.014.147
2	Sekretaris	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
3	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
4	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
5	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	Rp 5.166.121	100%	25%		Rp 6.457.651
<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>								
6	Rescuer Penyelia/ Pranata Pencarian dan Pertolongan Penyelia	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	Rp 5.166.121	90%	5%		Rp 4.907.815
7	Rescuer Pelaksana Lanjutan/ Pranata Pencarian dan Pertolongan Mahir	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	Rp 4.152.215	90%	5%		Rp 3.944.604
8	Rescuer Pelaksana/ Pranata Pencarian dan Pertolongan Terampil	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Rp 3.660.991	90%	5%		Rp 3.477.942
9	Rescuer Pelaksana Pemula/ Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Rp 3.181.359	90%	5%		Rp 3.022.291
10	Pranata Komputer Muda	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
11	Pranata Komputer Pertama	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
12	Pranata Komputer Penyelia	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
13	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
14	Pranata Komputer Pelaksana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
15	Pranata Komputer Pelaksana Pemula	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
16	Penata Laksana Barang Penyelia	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	Rp 5.166.121	90%			Rp 4.649.509
17	Penata Laksana Barang Mahir	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	Rp 4.152.215	90%			Rp 3.736.993
18	Penata Laksana Barang Terampil	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
<b>JABATAN PELAKSANA</b>								
19	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
20	Analisis Tata Laksana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
21	Bendahara	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Rp 3.660.991	90%	15%		Rp 3.844.041
22	Verifikator Keuangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223

No	Nama Jabatan	Unit Kerja	Kelas	Basic TPP	% Beban Kerja	% Kondisi Kerja	% Kelangkaan Profesi	TOTAL/BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Pengelola Teknologi Informasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
24	Pengadministrasi Keuangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
25	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
26	Pengadministrasi umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
27	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
28	Analisis Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
29	Pranata Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
30	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	Rp 2.653.156	90%	15%		Rp 2.785.814
31	Analisis Dampak Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
32	Pranata Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
33	Pengelola Data Bantuan Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
34	Pengadministrasi umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841
35	Penyusun Rencana Rehabilitasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	Rp 3.660.991	90%			Rp 3.294.892
36	Pranata Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	Rp 3.181.359	90%			Rp 2.863.223
37	Pengadministrasi umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	Rp 2.653.156	90%			Rp 2.387.841

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

*Alfrial*

ALFIRIAL, S.H., MH  
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA